



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

RENCANA KERJA (RENJA) 2024

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telp. (0760) 561616 – 561621 Fax (0760) 561617
TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 14 /SK/BPKAD/2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memutar arahkan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu1 (satu) Tahun;
- c. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42867);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka (RPJN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
25. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kelola Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024. Sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 08 Agustus 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

DELIS MARTONI S.E
Pembina Tk. I
NIP. 19700305 200003 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 ini akhirnya dapat dilaksanakan walaupun dengan segala keterbatasan yang ada.

Penetapan Perencanaan Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul.

Penetapan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ini agar dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk tahun mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Aamiin.

TelukKuantan, 08 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


DELIS MARTONI, S.E
NIP. 19700305 200003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	11
2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	16
3.3 Program dan Kegiatan	17
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	21
4.1 Rencana Kerja.....	21
4.2 Pendanaaan Perangkat Daerah	25
Bab V Penutup	26
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Belanja langsung Tahun Anggaran 2022.....	9
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 s/d 2026.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD Merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Merupakan pedoman bagi dalam

penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode tahun 2021-2026, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026, Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja BPKAD Tahun 2024, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Pemerintah Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026.

Adapun maksud penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, pengawsan dan pelaporan keuangan dengan OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Singingi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi adalah;

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024.

- d. Memberi Arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
- e. Mewujudkan visi dan misi BPKAD dalam memberikan pelayanan publik optimal dan prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Perencanaan Renja OPD
- 2.2. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuantan Singingi memuat review hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022 serta Rencana Program dan Kegiatan tahun 2024. Penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2024 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2022.

Pada tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.521.948.269,00- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar lima ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*) yang tertuang dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan. Untuk realisasi keuangan pada tahun 2022 sebesar Rp. 267.609.500.619,00- (*Dua ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus ribu enam ratus Sembilan belas rupiah*). Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD pada anggaran tahun 2022 tingkat capaian kinerja dan capaian keuangannya sebesar 98,92 % (dapat dilihat pada tabel 2.1).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang dilaksanakan Tabel 2.2 (Lampiran 1) .

Capaian indikator program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 yang terdiri dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan, menunjukkan tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja yang hendak dicapai meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang

mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrument penilaian. Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala daerah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah di daerah.

Dimana anggaran sebesar sebesar Rp. 270.521.948.269,00- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar lima ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*) dengan serapan realisasi anggaran sebesar 98,92 % atau sebesar Rp. 267.609.500.619,00- (*Dua ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus ribu enam ratus Sembilan belas rupiah*). Sedangkan untuk capaian kinerjanya kegiatan dan sub kegiatan sebahagian besar sudah mencapai hampir 100%.

Tabel 2.1	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022				
NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA PEMBIAYAAN		TARGET CAPAIAN (%)	KET
		ALOKASI	REALISASI		
1	2	4	12	13	16
5.2.	BELANJA LANGSUNG	270,521,948,269.00	267,609,500,619.00	98.92	
5.02.5.02.0.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,682,700.00	12,682,700.00	100.00	
5.02.5.02.0.001.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,142,000.00	8,142,000.00	100.00	
5.02.5.02.0.001.2.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,540,700.00	4,540,700.00	100.00	
5.02.5.02.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,524,387,178	9,252,555,197.00	97.15	
5.02.5.02.0.001.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,524,387,178	9,252,555,197.00	97.15	
5.02.5.02.0.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	356,430,000.00	327,434,474.00	91.87	
5.02.5.02.0.001.2.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	356,430,000.00	327,434,474.00	91.87	
5.02.5.02.0.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	541,573,900.00	336,180,267.00	62.07	
5.02.5.02.0.001.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,473,500.00	4,069,700.00	38.86	
5.02.5.02.0.001.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118,120,000.00	80,016,000.00	67.74	
5.02.5.02.0.001.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52,284,800.00	21,045,400.00	40.25	
5.02.5.02.0.001.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,330,000.00	6,720,000.00	59.31	
5.02.5.02.0.001.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349,365,600.00	224,329,167.00	64.21	
5.02.5.02.0.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202,700,000.00	138,500,000.00	68.33	
5.02.5.02.0.001.2.07.10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202,700,000.00	138,500,000.00	68.33	
5.02.5.02.0.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596,411,630.00	468,551,570.00	78.56	
5.02.5.02.0.001.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,585,000.00	18,908,500.00	68.55	
5.02.5.02.0.001.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	568,826,630.00	449,643,070.00	79.05	

5.02.5.02.0.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408,954,352.00	317,144,301.00	77.55	
5.02.5.02.0.001.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,530,000.00	32,579,000.00	84.55	
5.02.5.02.0.001.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234,920,000.00	196,978,015.00	83.85	
5.02.5.02.0.001.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,924,352.00	34,644,286.00	57.81	
5.02.5.02.0.001.2.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,580,000.00	52,943,000.00	70.05	
5.02.5.02.0.002.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,222,475,800.00	860,495,530.00	70.39	
5.02.5.02.0.002.2.01.01	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	41,303,600.00	39,450,600.00	95.51	
5.02.5.02.0.002.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	35,465,300.00	28,966,000.00	81.67	
5.02.5.02.0.002.2.01.05	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	21,309,000.00	17,246,500.00	80.94	
5.02.5.02.0.002.2.01.06	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	35,211,100.00	18,263,100.00	51.87	
5.02.5.02.0.002.2.01.07	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	391,862,500.00	327,320,100.00	83.53	
5.02.5.02.0.002.2.01.08	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran APBD	268,758,100.00	184,988,200.00	68.83	
5.02.5.02.0.002.2.01.09	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	176,044,000.00	108,849,030.00	61.83	
5.02.5.02.0.002.2.01.10	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	50,193,000.00	18,874,000.00	37.60	
5.02.5.02.0.002.2.01.11	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	164,041,200.00	82,184,000.00	50.10	
5.02.5.02.0.002.2.01.12	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	38,288,000.00	34,354,000.00	89.73	
5.02.5.02.0.002.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	400,539,300.00	375,222,532.00	93.68	
5.02.5.02.0.002.2.02.01	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	11,946,400.00	11,113,255.00	93.03	
5.02.5.02.0.002.2.02.03	- Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	40,017,500.00	35,800,217.00	89.46	
5.02.5.02.0.002.2.02.04	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	7,130,400.00	6,730,400.00	94.39	
5.02.5.02.0.002.2.02.05	- Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6,673,900.00	6,134,778.00	91.92	
5.02.5.02.0.002.2.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	14,787,200.00	12,484,148.00	84.43	

5.02.5.02.0.002.2.02.08	- Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	9,509,000.00	8,705,700.00	91.55	
5.02.5.02.0.002.2.02.09	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	25,795,100.00	12,828,100.00	49.73	
5.02.5.02.0.002.2.02.10	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	152,348,000.00	152,291,376.00	99.96	
5.02.5.02.0.002.2.02.11	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	132,331,800.00	129,134,558.00	97.58	
5.02.5.02.0.002.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	868,410,900.00	803,873,432.00	92.57	
5.02.5.02.0.002.2.03.03	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	38,691,000.00	35,105,000.00	90.73	
5.02.5.02.0.002.2.03.04	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	334,684,000.00	312,396,493.00	93.34	
5.02.5.02.0.002.2.03.05	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	68,716,000.00	64,074,779.00	93.25	
5.02.5.02.0.002.2.03.09	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah	262,551,200.00	232,519,492.00	88.56	
5.02.5.02.0.002.2.03.10	- Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	85,327,200.00	84,338,200.00	98.84	
5.02.5.02.0.002.2.03.11	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	78,441,500.00	75,439,468.00	96.17	
5.02.5.02.0.002.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	255,435,365,809.00	254,030,265,033.00	99.45	
5.02.5.02.0.002.2.04.08	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	253,914,259,259.00	253,630,715,889.00	99.89	
5.02.5.02.0.002.2.04.09	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1,521,106,550.00	399,549,144.00	26.27	
5.02.5.02.0.002.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	541,316,900.00	352,895,460.00	65.19	
5.02.5.02.0.002.2.05.02	- Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	330,000,000.00	161,700,000.00	49.00	
5.02.5.02.0.002.2.05.03	- Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	211,316,900.00	191,195,460.00	90.48	

5.02.5.02.0.003.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah	410,699,800.00	333,700,123.00	81.25	
5.02.5.02.0.003.2.01.01	- Penyusunan Standar Harga	52,824,000.00	40,834,000.00	77.30	
5.02.5.02.0.003.2.01.03	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	57,583,500.00	40,637,500.00	70.57	
5.02.5.02.0.003.2.01.05	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	174,739,900.00	151,916,223.00	86.94	
5.02.5.02.0.003.2.01.10	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	48,756,700.00	35,607,700.00	73.03	
5.02.5.02.0.003.2.01.11	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	76,795,700.00	64,704,700.00	84.26	
	JUMLAH	270,521,948,269.00	267,609,500,619.00	98.92	

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Tahun Anggaran 2022

- **Faktor-faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan**

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi selaku Koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal.

- **Terhadap Implikasi yang timbul dari target capaian program/kegiatan**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara kualitas pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi keuangan telah mencapai sebesar 98,4 % berarti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan secara efisien dalam penganggaran.

Secara kualitas pencapaian sasaran srategis telah sesuai dengan dtetapkan, walaupun masih ada ha-hal lainnya yang masih menjadi kendala, antara lain dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Dimana Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Sistem/mechanisme

pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh OPD.

Terkait dengan aset daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Maka harus dilakukan penyajian kembali/restatement atas aset daerah dalam neraca antara lain:

1. Persediaan.
2. Aset tetap, disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan
3. Aset tetap tidak berwujud, disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja Program/Kegiatan yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang berasal dari Pusat bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Melakukan pembinaan melalui asistensi di Anggaran, Penatausahaan dan Aset.
3. Melakukan Bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pelatihan.
4. Setiap Sub Bidang membuat Rencana Anggaran Kegiatan sehingga anggaran kegiatan yang terdapat di DPA terserap semua baik keuangan maupun kinerja karena sudah direncanakan secara proporsional.
5. Saat penyusunan Renja Tahunan, RKA dan DPA mengacu kepada Renstra yang ada sehingga penyerapan kinerja dapat tercapai 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses

penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.3. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran

Isu strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah, dan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Perspektif Proses Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Isu strategis dalam perspektif internal pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengembangan sistem teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual), pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi.

3. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholders

Isu strategis dalam perspektif pemangku kepentingan/stakeholders adalah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial keuangan dan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan/pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- **Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program.**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Berdasarkan visi Bupati Kuantan Singingi tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam melaksanakan Misi ke 2 yaitu **“Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis”**. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas

pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki peran ganda sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, yaitu :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;
5. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamankan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
6. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia
7. Integritas, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dengan pelaksanaan pola kerja berbasis kinerja dan penerapan *reward and punishment* serta peningkatan standar moral ;
8. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi eksekutif;
9. Review dan pemutakhiran produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
10. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dengan optimalisasi penggunaan serta penyempurnaan sistem informasi dan data base keuangan dan aset daerah serta pengintegrasian sistem informasi keuangan dengan sistem informasi barang milik daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 2004 kepada Pemerintah Daerah untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah Rencana Tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jajaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan review yang telah dilakukan, tidak ada terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 Dengan hasil analisa Kebutuhan sesuai dengan Perbub Rancangan akhir RKPD tahun 2024 berikut ini (Tabel 2.3 lampiran 2).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah " **Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis**". Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Maka sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya tata kelola keuangan yang berkualitas dan akuntabel, serta Meningkatnya penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas.

Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi keuangan dan barang daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya, dimana capaian indikator kinerja tujuan merupakan capaian kinerja Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan, sedangkan capaian indikator sasaran merupakan capaian kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian, setiap tujuan dan sasaran RPJMD memiliki indikator yang terukur, relevan dengan apa yang akan diperbaiki dan dapat diukur setiap tahunnya mulai tahun 2021-2026. Adapun tujuan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel 3.1 Berikut ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Lama Waktu Penyelenggaraan penatausahaan Keuangan	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
			Ketepatan waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Meningkatnya penata usahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	70	75	75	80	80

Sumber: Renstra BPKAD Tahun 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
2. Pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan tugas dan fungsi

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan bahan logistic kantor
3. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan sarana dan prasana Gedung kantor atau bangunan lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
6. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
8. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
9. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
10. Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
11. Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah

12. Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
2. Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
3. Penatausahaan pembiayaan daerah
4. Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya
5. Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)
6. Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
7. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
8. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan
9. Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah

1. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
2. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
4. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah

5. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
6. Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
2. Pengelolaan dana darurat dan mendesak

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1. Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah
2. Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota

03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan standar harga
2. Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah
3. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
4. Penatausahaan barang milik daerah
5. Pengamanan barang milik daerah
6. Penilaian barang milik daerah
7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
8. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
9. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
10. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota

Untuk Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 (Lampiran 3).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana kerja program dan kegiatan disusun berdasarkan tupoksi masing-masing bidang dan sub bidang pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2024, adalah sebagai berikut:

01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2 Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 2 Pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan tugas dan fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2 Penyediaan bahan logistic kantor
- 3 Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
- 4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Pengadaan sarana dan prasana Gedung kantor atau bangunan lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 3 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- 4 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1 Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
- 2 Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
- 4 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
- 5 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
- 6 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
- 7 Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
- 8 Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
- 9 Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
- 10 Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
- 11 Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah
- 12 Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
- 2 Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
- 3 Penatausahaan pembiayaan daerah

- 4 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya
- 5 Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)
- 6 Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
- 7 Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
- 8 Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan
- 9 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah

- 1 Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
- 2 Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
- 3 Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
- 4 Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
- 5 Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
- 6 Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1 Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
- 2 Pengelolaan dana darurat dan mendesak

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- 1 Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah
- 2 Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota

03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1 Penyusunan standar harga
- 2 Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah
- 3 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- 4 Penatausahaan barang milik daerah
- 5 Pengamanan barang milik daerah
- 6 Penilaian barang milik daerah
- 7 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
- 8 Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
- 9 Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
- 10 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan rencana kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak sepenuhnya berpatokan pada nomenklatur kegiatan dan pagu anggaran yang tercantum pada daftar Program/Kegiatan RKPD, dimana RKPD merupakan acuan bagi penyusunan

Rencana Kerja setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan diperlukan dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 321.314.245.751,- (*Tiga ratus dua puluh satu milyar tiga ratus empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 mengarahkan program dan kegiatan yang strategis dalam penyusunan APBD tahun 2024 berdasarkan fungsi dan urusan pemerintah daerah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2021 – 2026.

Untuk itu diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mampu menunjukkan/memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas rencana strategis yang ingin dicapai. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

Akhir kata segenap Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengharapakan agar Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dapat memberikan informasi kepada stakeholders dalam pengambilan keputusan sekaligus untuk meningkatkan kinerja aparatur.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kuantan Singingi

Lampiran 1.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra OPD) pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra BPKAD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd/ Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5										
5	2									
5	2	01								
5	2	01	2	01						
5	2	01	2	01	01					
5	2	01	2	01	07					
5	2	01	2	02						
5	2	01	2	02	01					
5	2	01	2	05						
5	2	01	2	05	09					
5	2	01	2	06						
5	2	01	2	06	01					
5	2	01	2	06	04					

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra OPD) pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra BPKAD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd/ Tahun 2022	
											Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5	2	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	885.960	Paket		177.192	177.192	100	177.192	177.192	20,00
5	2	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15	Dokumen		3	3	100	3	3	20,00
5	2	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.510	Laporan		302	302	100	302	302	20,00
5	2	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40	-		8	8	100	8	8	20,00
5	2	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40	Unit		8	8	100	8	8	20,00
5	2	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		19.045	-		3.809	3.809	100	3.787	3.787	19,88
5	2	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18875	Laporan		3.775	3.775	100	3.775	3.775	20,00
5	2	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170	Laporan		34	34	100	12	12	7,06
5	2	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		550			110	110	100	110	110	20,00
5	2	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	5	Unit		1	1	100	1	1	20,00
5	2	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	35	Unit		7	7	100	7	7	20,00
5	2	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	5	Unit		1	1	100	1	1	20,00
5	2	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	505	Unit		101	101	100	101	101	20,00
5	2	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		86.670	-		17.444	17.444	100	17.363	17.363	20,03
5	2	02	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		2.460	-		582	582	100	492	492	20,00
5	2	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	Dokumen		2	2	100	2	2	20,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra OPD) pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra BPKAD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd/ Tahun 2022	
										Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4		5	6	7	8	9	10	11
5	2	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10	Dokumen		2	2	100	2	2	20,00
5	2	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	410	Dokumen		82	82	100	82	82	20,00
5	2	02	2	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	410	Dokumen		82	82	100	82	82	20,00
5	2	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	410	Dokumen		82	82	100	82	82	20,00
5	2	02	2	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	410	Dokumen		82	82	100	82	82	20,00
5	2	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	Dokumen		2	2	100	2	2	20,00
5	2	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	Dokumen		2	2	100	2	2	20,00
5	2	02	2	01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30	Dokumen		6	6	100	6	6	20,00
5	2	02	2	01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	250	Dokumen		80	80	100	50	50	20,00
5	2	02	2	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	250	Dokumen		80	80	100	50	50	20,00
5	2	02	2	01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	250	Dokumen		80	80	100	50	50	20,00
5	2	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	80.430	-		16.116	16.116	100	16.116	16.116	20,04
5	2	02	2	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	250	Dokumen		50	50	100	50	50	20,00
5	2	02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50000	Dokumen		10.000	10.000	100	10000	10000	20,00
5	2	02	2	02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	95	Laporan		19	19	100	19	19	20,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra OPD) pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra BPKAD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2022	Perangkat Daerah sd/ Tahun 2022	
											Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5	2	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	125	Dokumen		25	25	100	25	25	20,00
5	2	02	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1430	Laporan		286	286	100	286	286	20,00
5	2	02	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1500	STS		300	300	100	300	300	20,00
5	2	02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	1430	Dokumen		286	286	100	286	286	20,00
5	2	02	2	02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	25000	Dokumen		5.000	5.000	100	5000	5000	20,00
5	2	02	2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600	Orang		150	150	100	150	150	25,00
5	2	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		2.260	-		452	452	100	452	452	20,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra OPD) pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra BPKAD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd/ Tahun 2022	
										Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	02	2	03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	85	Laporan	17	17	100	17	17	20,00
5	2	02	2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5	Laporan	1	1	100	1	1	20,00
5	2	02	2	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Dokumen	2	2	100	2	2	20,00
5	2	02	2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	10	Dokumen	2	2	100	2	2	20,00
5	2	02	2	03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	10	Dokumen	2	2	100	2	2	20,00
5	2	02	2	03	11	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	2140	Orang	428	428	100	428	428	20,00
5	2	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1.140	-	218	218	100	227	227	19,91
5	2	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1090	Jumlah Desa	218	218	100	218	218	20,00
5	2	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50	Jumlah kejadian Bencana	-	-	#DIV/0!	9	9	18,00
5	2	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	380	-	76	76	100	76	76	20,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra OPD) pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra BPKAD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2022	Perangkat Daerah sd/ Tahun 2022	
										Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	02	2	05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	Aplikasi	1	1	100	1	1	20,00
5	2	02	2	05	03	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	375	Orang	75	75	100	75	75	20,00
5	2	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		445	-	89	89	100	89	89	20,00
5	2	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		445	Dokumen	89	89	100	89	89	20,00
5	2	03	2	01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Dokumen	1	1	100	1	1	20,00
5	2	03	2	01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	1	1	100	1	1	20,00
5	2	03	2	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	20	Dokumen	4	4	100	4	4	20,00
5	2	03	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10	Laporan	2	2	100	2	2	20,00
5	2	03	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	1	1	100	1	1	20,00
5	2	03	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Laporan	1	1	100	1	1	20,00
5	2	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	Laporan	2	2	100	2	2	20,00
5	2	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	1	1	100	1	1	20,00

KODE							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra OPD) pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra BPKAD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
											Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1							2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5	2	03	2	01	11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	1	1	100	1	1	20,00	
5	2	03	2	01	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	375	Orang	75	75	100	75	75	20,00	

Lampiran 2.

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Kebutuhan				
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02					KEUANGAN				321.314.244.275					321.314.245.751
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				14.691.366.275	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				14.691.366.497
5	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.143.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.143.750
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	10.762.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	10.762.500
5	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5.381.250	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5.381.250
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.651.950.250	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.651.950.271
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah ASN	75 ASN	11.651.950.250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah ASN	75 ASN	11.651.950.271
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				810.285.550	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				810.285.563
5	02	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering			76.875.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering			76.875.000
5	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Yang Mengikuti	75 ASN	733.410.550	Pendidikan dan Pelatihan Formal Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Yang Mengikuti	75 ASN	733.410.563
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				648.988.025	Administrasi Umum Perangkat Daerah				648.988.113
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis Komponen	7 Jenis	11.272.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis Komponen	7 Jenis	11.272.104
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis ATK yang disediakan, Jumlah Porsi	25 Jenis, 1800 Porsi	131.656.025	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis ATK yang disediakan, Jumlah Porsi	25 Jenis, 1800 Porsi	141.656.025
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Barang Penggandaan	177.192 Lembar	43.699.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Barang Penggandaan	177.192 Lembar	83.699.532
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis	12.193.900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis	12.193.913
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	302 Kali	450.166.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	302 Kali	400.166.540
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				218.155.875	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				218.155.875

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Kebutuhan				
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 unit	218.155.875	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 unit	218.155.875
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				905.705.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				905.705.804
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Surat Yang Terkirim	3775 Surat	37.598.750	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Surat Yang Terkirim	3775 Surat	37.598.794
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Tenaga pelayanan umum kantor	12 Orang	868.107.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Tenaga pelayanan umum kantor	12 Orang	868.107.010
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.137.075	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.137.121
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Mobil Jabatan	1 Unit	41.467.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Mobil Jabatan	1 Unit	41.467.913
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Mobil Operasional	7 Unit	252.832.650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Mobil Operasional	7 Unit	252.832.650
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Luas Gedung Yang Dipelihara	600 m2	64.493.550	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Luas Gedung Yang Dipelihara	600 m2	64.493.584
5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	101 unit	81.342.975	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	101 unit	81.342.975
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				305.661.032.750	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				305.661.033.880
5	02	02	2			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.546.952.800	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.546.952.986
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	46.178.650	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	46.178.659
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	40.752.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	40.752.529
5	02	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	82 DPA SKPD	18.264.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	82 DPA SKPD	18.264.070
5	02	02	2	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	82 DPA SKPD	20.190.350	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	82 DPA SKPD	20.190.342
5	02	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DKA SKPD	82 DPA SKPD	22.933.800	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DKA SKPD	82 DPA SKPD	22.933.811
5	02	02	2	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DKA-P SKPD	82 DPA SKPD	37.895.950	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DKA-P SKPD	82 DPA SKPD	37.895.946

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Kebutuhan				
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	411.492.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	411.492.016
5	02	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	381.092.900	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	381.092.914
5	02	02	2	01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	207.820.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	207.820.001
5	02	02	2	01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	50 Kali	109.542.950	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	50 Kali	109.542.985
5	02	02	2	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	50 Kali	198.865.800	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	50 Kali	198.865.816
5	02	02	2	01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	50 Kali	51.923.900	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	50 Kali	51.923.897
5	02	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				772.641.650	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				772.641.802
5	02	02	2	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	50 dokumen	24.459.300	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	50 dokumen	24.459.288
5	02	02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	10000 dokumen	74.022.100	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	10000 dokumen	74.022.107
5	02	02	2	02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	19 laporan	41.210.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	19 laporan	41.210.043
5	02	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi Koordinasi	25 Kali	32.743.700	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi Koordinasi	25 Kali	32.743.722
5	02	02	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	286 dokumen	35.448.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	286 dokumen	35.448.662
5	02	02	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah STS	300 STS	32.189.550	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah STS	300 STS	32.189.561
5	02	02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	286 dokumen	47.123.700	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	286 dokumen	47.123.714

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Kebutuhan					
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5	02	02		2	02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5000 dokumen	309.852.550	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5000 dokumen	309.852.580
5	02	02		2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6500 dokumen	175.592.100	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	163.151.800	175.592.125
5	02	02		2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.082.641.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.082.642.377
5	02	02		2	03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	17 laporan	106.197.600	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	17 laporan	62.945.773
5	02	02		2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	541.728.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	381.035.755
5	02	02		2	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	121.396.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	109.321.170
5	02	02		2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	99.280.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	310.508.888
5	02	02		2	03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	untuk di tanyakan ke kabit akutansi dulu		0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	untuk di tanyakan ke kabit akutansi dulu		116.587.149
5	02	02		2	03	11	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	428 Bendahara	214.040.000	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	428 Bendahara	102.243.642
5	02	02		2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				301.438.796.700	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				301.438.796.716
5	02	02		2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang disalurkan dana desanya	218 desa	295.357.984.200	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang disalurkan dana desanya	218 desa	295.357.984.216
5	02	02		2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kejadian Bencana	10 desa	6.080.812.500	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kejadian Bencana	10 desa	6.080.812.500
5	02	02		2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				820.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				820.000.000
5	02	02		2	05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	75 orang	461.250.000	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	75 orang	461.250.000
5	02	02		2	05	03	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	75 orang	358.750.000	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	75 orang	358.750.000

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Kebutuhan				
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				961.845.250	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				961.845.373
5	02	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				961.845.250	Pengelolaan Barang Milik Daerah				961.845.373
5	02	03	2	01	01	Penyusunan Standar Harga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	165.094.350	Penyusunan Standar Harga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	71.488.830
5	02	03	2	01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	0	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	93.605.552
5	02	03	2	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	4 dokumen	81.390.300	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	4 dokumen	81.390.330
5	02	03	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	196.288.700	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	196.288.730
5	02	03	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	71.753.588
5	02	03	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	166.430.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	94.676.421
5	02	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	0	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	99.616.409
5	02	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	71.783.700	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	71.783.723
5	02	03	2	01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	95.997.200	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	95.997.195
5	02	03	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	184.861.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	85.244.597

Teluk Kuantan, Agustus 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi,

DELIS MARTONI, S.E
NIP. 19700305 200003 1 005

Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	02					KEUANGAN		321.314.244.275
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.691.366.275
5	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.143.750
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	10.762.500
5	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	5.381.250
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.651.950.250
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Pelayanan Publik	11.651.950.250
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		810.285.550
5	02	01	2	05	01	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Peningkatan Pelayanan Publik	76.875.000
5	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Pelayanan Publik	733.410.550
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		648.988.025
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik	11.272.100
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik	131.656.025
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik	43.699.500
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Publik	12.193.900
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	450.166.500
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		218.155.875
5	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Publik	218.155.875
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		905.705.750

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik	37.598.750
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik	868.107.000
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		440.137.075
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Pelayanan Publik	41.467.900
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Pelayanan Publik	252.832.650
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Publik	64.493.550
5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Publik	81.342.975
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		305.661.032.750
5	02	02	2			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.546.952.800
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Peningkatan Pelayanan Publik	46.178.650
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Peningkatan Pelayanan Publik	40.752.500
5	02	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	18.264.000
5	02	02	2	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	20.190.350
5	02	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	22.933.800
5	02	02	2	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	37.895.950
5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peningkatan Pelayanan Publik	411.492.000
5	02	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peningkatan Pelayanan Publik	381.092.900
5	02	02	2	01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Peningkatan Pelayanan Publik	207.820.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2	01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Peningkatan Pelayanan Publik	109.542.950
5	02	02	2	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	198.865.800
5	02	02	2	01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Peningkatan Pelayanan Publik	51.923.900
5	02	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		772.641.650
5	02	02	2	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	24.459.300
5	02	02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Peningkatan Pelayanan Publik	74.022.100
5	02	02	2	02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	41.210.000
5	02	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Peningkatan Pelayanan Publik	32.743.700
5	02	02	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Peningkatan Pelayanan Publik	35.448.650
5	02	02	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Peningkatan Pelayanan Publik	32.189.550
5	02	02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Peningkatan Pelayanan Publik	47.123.700
5	02	02	2	02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Publik	309.852.550
5	02	02	2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Publik	175.592.100
5	02	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.082.641.600

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2	03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Peningkatan Pelayanan Publik	106.197.600
5	02	02	2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	541.728.000
5	02	02	2	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Publik	121.396.000
5	02	02	2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	99.280.000
5	02	02	2	03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	0
5	02	02	2	03	11	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Publik	214.040.000
5	02	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		301.438.796.700
5	02	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik	295.357.984.200
5	02	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Peningkatan Pelayanan Publik	6.080.812.500
5	02	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		820.000.000
5	02	02	2	05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang Keuangan Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	461.250.000
5	02	02	2	05	03	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Publik	358.750.000
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		961.845.250
5	02	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		961.845.250
5	02	03	2	01	01	Penyusunan Standar Harga	Peningkatan Pelayanan Publik	165.094.350
5	02	03	2	01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	0
5	02	03	2	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	81.390.300

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	03	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	196.288.700
5	02	03	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	0
5	02	03	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	166.430.000
5	02	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	0
5	02	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	71.783.700
5	02	03	2	01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	95.997.200
5	02	03	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Publik	184.861.000

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						314.202.846.578,68							330.977.777.842,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						314.202.846.578,68							330.977.777.842,00	
	5.02	KEUANGAN						314.202.846.578,68							330.977.777.842,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	16.525.662.818,00						-	16.558.053.695,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan dokumen Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	16.143.750,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	16.547.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.762.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		11.031.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5.381.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		5.515.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen adminitrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	11.479.294.898,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	11.943.249.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	11.479.294.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		11.943.249.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	792.034.000,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	830.542.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				67 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		78.796.875,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				67 Orang	717.034.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		751.745.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 %	1.302.595.500,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	665.212.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		11.553.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2825 Paket	166.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		145.197.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				145665 Paket	43.699.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		85.792.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	11.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		12.498.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				396 Laporan	1.069.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		410.170.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	866.000.000,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	1.024.609.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	561.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		561.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		223.609.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	1.229.457.720,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	1.230.397.770,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3775 Laporan	37.598.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		38.538.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	1.191.859.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		1.191.859.020,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			100 %	840.136.950,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	847.494.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41.467.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		42.504.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	252.832.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		259.153.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				600m2, 1 paket Unit	264.493.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		264.493.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				101, 1 paket Unit	281.342.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		281.342.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Persentase sub kegiatan yang tidak terlaksana Persentase SILPA terhadap APBD Penyelenggaraan penatausahaan sesuai ketentuan (Hari) Penyampaian Laporan Keuangan Opini BPK RI Persentase Dana Desa yang disalurkan Persentase OPD dengan dokumen penatausahaan sesuai aturan Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai aturan	100 Persen 100 Persen 30-11-2025 Tahun 3,50 Persen 0,5 Persen 3 Bulan WTP Opini 2 Hari 100 Persen			30-11-2022 Tahun 0,8 Persen 3,50 Persen 2 Hari 3 Bulan WTP Opini 100 Persen 100 Persen 100 Persen	296.715.338.760,68						100 Persen 100 Persen 30-11-2024 Tahun 3,50 Persen 0,5 Persen 3 Bulan WTP Opini 2 Hari 100 Persen	313.183.057.850,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	-			100 %	1.546.952.000,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	1.585.626.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	45.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		47.333.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	39.758.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		41.771.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				82 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	-		18.720.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				82 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	-		20.695.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				82 Dokumen	22.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		23.507.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				82 Dokumen	36.971.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		38.843.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	628.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		421.779.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	181.797.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		390.620.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	255.942.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		213.015.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				50 Dokumen	106.871.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		112.281.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				50 Dokumen	194.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		203.837.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				50 Dokumen	35.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		53.221.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD dengan dokumen penatausahaan sesuai aturan	-			100 %	772.641.802,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	791.957.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				50 Dokumen	97.858.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		25.070.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				10000 Dokumen	74.022.107,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		75.872.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				19 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	-		42.240.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				25 Dokumen	32.743.722,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		33.562.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				286 Laporan	35.448.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		36.334.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				300 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		32.994.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				286 Dokumen	47.123.714,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		48.301.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5000 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	-		317.598.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				75 Orang	485.444.705,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		179.981.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK RI, Penyampaian laporan keuangan, Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai aturan	-			WTP	1.082.641.600,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	990.206.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	122.850.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		64.519.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	540.466.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		390.561.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	117.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		112.054.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	69.745.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		169.221.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		83.425.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				4 Dokumen	79.405.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		79.405.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				2 Laporan	212.823.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		201.195.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	70.003.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		71.753.588,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	92.367.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		170.590.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				2 Laporan	97.186.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		99.616.409,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	70.032.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		73.578.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	123.655.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		98.397.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				75 Orang	146.624.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		189.482.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	J U M L A H							314.202.846.578,68							330.977.777.842,00		